

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

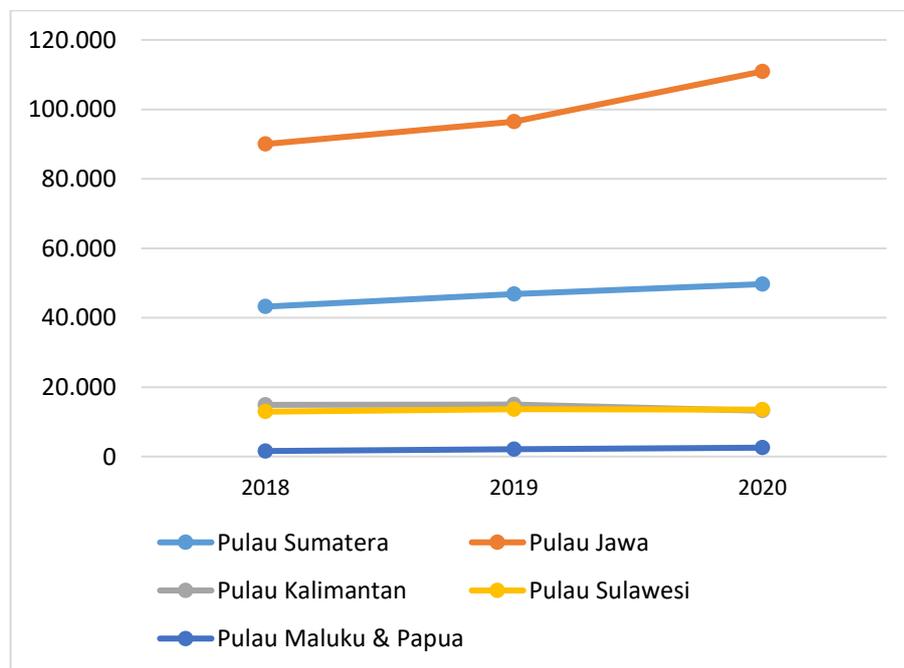
Sumber keuangan merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan dapat membuat suatu daerah agar dapat meningkatkan sumber pendapatannya untuk memenuhi suatu pembiayaan yang juga dituntut dapat mengedepankan kemandirian daerah. Diperlukannya sumber-sumber penerimaan dalam pelaksanaan suatu pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Besarnya biaya pembangunan yang dibutuhkan membuat pemerintah daerah dituntut agar mampu dalam menggali potensi pendapatan daerah yang didapat dari penerimaan pajak. Besarnya penerimaan pajak sebagai referensi pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak sebagai ujung tombak pembangunan.

Penerimaan pajak pada enam provinsi di pulau Jawa memberikan peran besar terhadap perekonomian dengan spesialisasi fungsi aktivitas sosial ekonomi. Hal ini didukung oleh tingginya mobilitas dan jumlah penduduk serta, pendapatan rata-rata yang diterima masyarakat dari berbagai kegiatan sektor industri dan jasa, serta pusat pemerintahan yang menunjang perolehan penerimaan pajak pada daerah tersebut. Apabila penerimaan pajak terhambat hal tersebut bisa berakibat pada pembangunan. Peranan pajak sangat penting saat pembiayaan daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan dan penyangga utama pada kegiatan yang dilakukan pada suatu daerah.

Menurut Teori Musgrave (1993) besarnya penerimaan pajak dapat ditentukan dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk berpengaruh positif atas penerimaan pajak, yang mana apabila jumlah penduduk meningkat maka mempunyai pengaruh pada jumlah wajib pajak. Pendapatan per kapita mempunyai pengaruh positif atas penerimaan pajak yang dapat digambarkan melalui peningkatan pada seluruh sektor

konsumsi yang juga memberikan indikasi bahwa kesanggupan penduduk selaku wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Inflasi mempunyai pengaruh positif atas penerimaan pajak dapat dikatakan apabila adanya lonjakan harga barang dan jasa yang berkelanjutan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang diterima tetap, sedangkan kebutuhan meningkat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat berdampak pada penghasilan masyarakat, maka kesanggupan masyarakat untuk membayar pajak menurun yang juga mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak. Jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif atas penerimaan pajak yang digambarkan dengan tingginya jumlah penduduk yang diikuti mobilitas yang tinggi dapat mendorong pertambahan jumlah kendaraan bermotor sebagai kebutuhan masyarakat, sehingga besaran pajak yang dikenakan pada kendaraan tersebut dapat berperan dalam penerimaan pajak. Keberadaan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah harus menjadi perhatian semua pihak karena tanpa pendapatan pajak, pembangunan dapat terhambat (Hartono, 2019).

Grafik 1. Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021, data diolah.

Didasarkan grafik tersebut, diketahui terdapat lima pulau besar di Indonesia yang memiliki peran terhadap penerimaan pajak. Peranan pajak sangat penting bagi pembiayaan yang menjadi sumber pendanaan dan penyangga utama dalam suatu

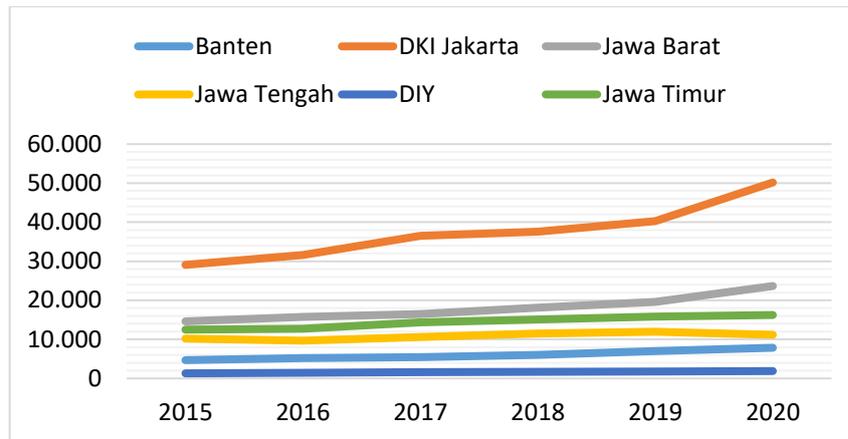
aktivitas pada suatu daerah. Dalam hal ini, Pulau Jawa memberikan peran terbesar jauh dibandingkan pulau lainnya. Perekonomian pulau Jawa memiliki peran penting bagi ekonomi nasional, aktivitas ekonomi juga terpusat di pulau ini.

Dari segi sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa tenaga kerja juga berpusat di pulau Jawa. Hal ini dibuktikan karena banyaknya pekerja yang menumpuk di pulau tersebut. Hal ini juga didukung oleh 56% total penduduk Indonesia yang menempati pulau ini dilihat sebagai pasar oleh industri Indonesia, sehingga kemudian banyak industri terkonsentrasi di pulau Jawa oleh sebab itu terdapat banyak penyettor pajak dari pulau tersebut. Hal ini, yang menyebabkan pulau Jawa mempunyai peranan penting untuk perekonomian secara nasional.

Hal lain yang menyebabkan tingginya penerimaan pajak Pulau Jawa adalah karena didukungnya dengan tidak hanya sumber daya alam, namun juga sektor lain yang tersebar di beberapa wilayahnya. Pulau ini juga mengendalikan sebesar 60% kegiatan ekspor dan impor nasional, serta pertumbuhan ekonomi yang pesat sejalan dengan pertumbuhan industri (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Terfokusnya pembangunan infrastruktur di pulau Jawa juga menjadi modal bagi pemerintah untuk pemeratakan pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang memadai telah dianggap sebagai hal penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Sistem infrastruktur yang berfungsi dengan baik dapat mengurangi biaya distribusi dan memfasilitasi mobilitas barang dan tenaga kerja yang berimplikasi pada efektifitas biaya produksi dan peningkatan nilai ekonomi.

Sementara pada empat pulau lainnya lebih mengandalkan pada sumber daya alam yang terdapat pada daerah tersebut. Keempat pulau tersebut juga memiliki infrastruktur kurang mencukupi yang dapat berpengaruh terhadap daya tarik pada investasi. Infrastruktur juga diperlukan untuk mendukung pengembangan dan pengoptimalan fungsi pada wilayah tersebut. Pada tahun 2020, hanya pulau Sulawesi dan Kalimantan yang mengalami penurunan penerimaan pajak daerah. Selain itu, akibatnya dua pulau tersebut juga mengalami pertumbuhan dibawah pertumbuhan nasional.

Grafik 2. Penerimaan Pajak (milyar) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020

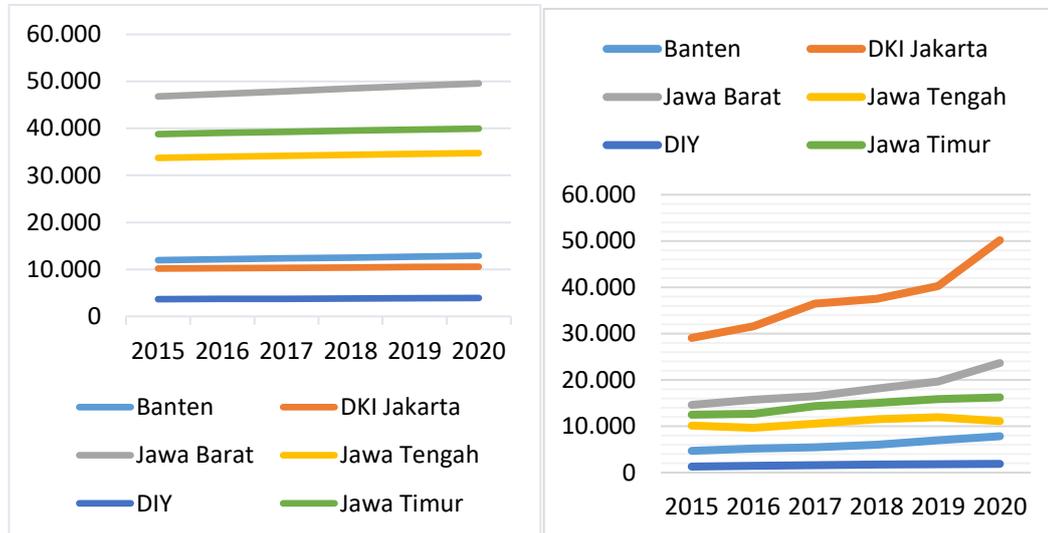


Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Data di atas menunjukkan selama enam tahun terakhir penerimaan dari pajak masih memberikan peran yang besar pada pendapatan daerah pulau Jawa. Hal ini terlihat dari kenaikan penerimaan pajak daerah pada enam provinsi tersebut tiap tahunnya. Kenaikan penerimaan pajak disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang terserap sebagai tenaga kerja didukung oleh tersedianya perusahaan-perusahaan yang berjalan di pulau tersebut. Banyaknya tenaga kerja yang terserap menunjukkan masyarakat memiliki pendapatan dalam mencukupi keperluan sehari-hari dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Besar kecilnya pendapatan tersebut dapat dipakai sebagai pemenuhan kebutuhan pokok maupun tambahan. Penerimaan pajak tertinggi dihasilkan Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata peningkatan sebanyak 37 milyar disebabkan adanya upaya optimalisasi pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Diikuti Provinsi Jawa Barat melalui stimulus berupa keringanan pajak menghasilkan rata-rata peningkatan sebesar 18 milyar. Pada wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten menghasilkan rata-rata peningkatan sebesar 6-10 milyar dari adanya pembebasan sanksi administrasi pungutan kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan. Kepadatan wilayah dapat mendorong penduduknya mementingkan kebutuhan tambahan sebagai upaya efisiensi waktu. Penerimaan pajak terendah terjadi pada Provinsi D.I Yogyakarta dengan rerata peningkatan berkisar sekitar 1.5 milyar, jumlah ini jauh dibandingkan dengan lima provinsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh tidak banyak perusahaan besar yang dapat menyerap tenaga kerja dikarenakan fokus wilayah tersebut bukan sebagai kawasan industri sehingga pendapatan yang dihasilkan

masyarakatnya cenderung lebih kecil. Besarnya pendapatan menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Grafik 3. Jumlah Penduduk (juta jiwa) dan Penerimaan Pajak (milyar) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020

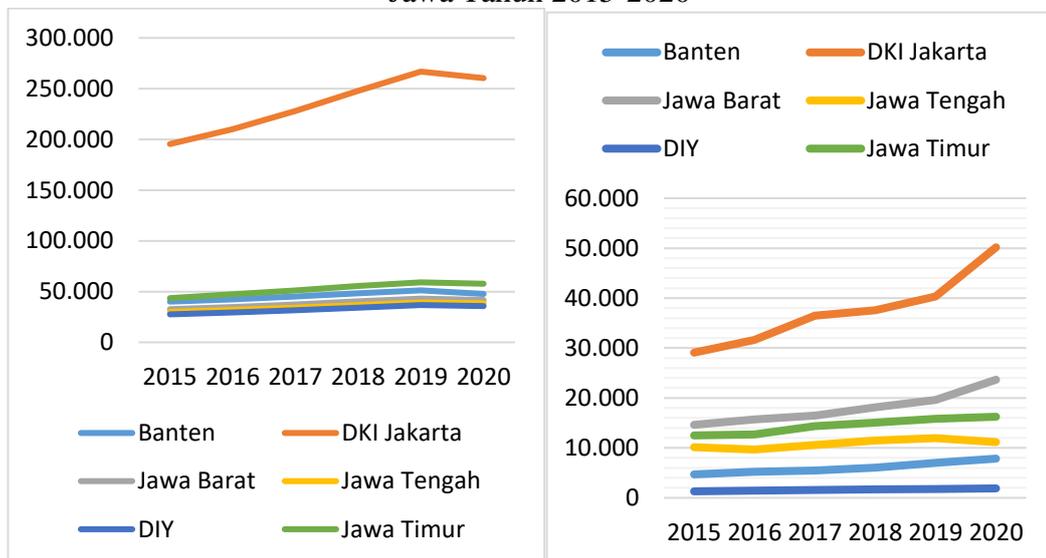


Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk ini karena sejak lama konsentrasi pembangunan berada di Pulau Jawa. Besarnya jumlah penduduk juga menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia pada suatu daerah. Besarnya jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi besarnya penyector pajak. Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa jumlah penduduk Pulau Jawa selama enam tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah penduduk tertinggi dengan rata-rata peningkatan sebesar 48 juta jiwa dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Tingginya peningkatan tersebut disebabkan oleh tingginya angka perkawinan usia dini yang mendorong tingginya angka kelahiran dan juga banyaknya pusat-pusat industri yang mendorong adanya migrasi. Hal sama terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah memiliki rata-rata peningkatan jumlah penduduk sebesar 35-40 juta jiwa hal ini disebabkan oleh kualitas lingkungan dan pendidikan yang mendorong migrasi, namun pada wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan penerimaan pajak pada tahun 2020. Pada wilayah Banten memiliki persebaran penduduk yang tidak merata, generasi x, generasi milenial dan generasi z mendominasi total penduduk Banten. Usia produktif dalam generasi tersebut menjadi peluang dalam percepatan pada pertumbuhan ekonomi. Adanya keberhasilan program keluarga

berencana mampu menekan pertumbuhan penduduk pada provinsi D.I Yogyakarta, sehingga jumlah penduduk hanya mencapai sekitar 3.5 juta jiwa. Pada DKI Jakarta jumlah penduduk rendah yang hanya berkisar 10 juta jiwa dibandingkan empat provinsi lainnya disebabkan oleh tingginya upah minimum yang menjadikan rata-rata penduduknya bukan penduduk yang menetap melainkan hanya rantauan yang bekerja, namun penerimaan pajak daerah terbesar dihasilkan oleh wilayah DKI Jakarta. Nyatanya hal ini berlawanan dengan teori pajak Musgrave, sebab tingginya jumlah penduduk dapat mempengaruhi besaran penerimaan pajak yang diterima oleh daerah. Hal ini menunjukkan, diperlukan peran serta tidak hanya sumber daya manusia dalam penerimaan pajak pada tiap daerah.

Grafik 4. Pendapatan Per Kapita (juta) dan Penerimaan Pajak (milyar) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

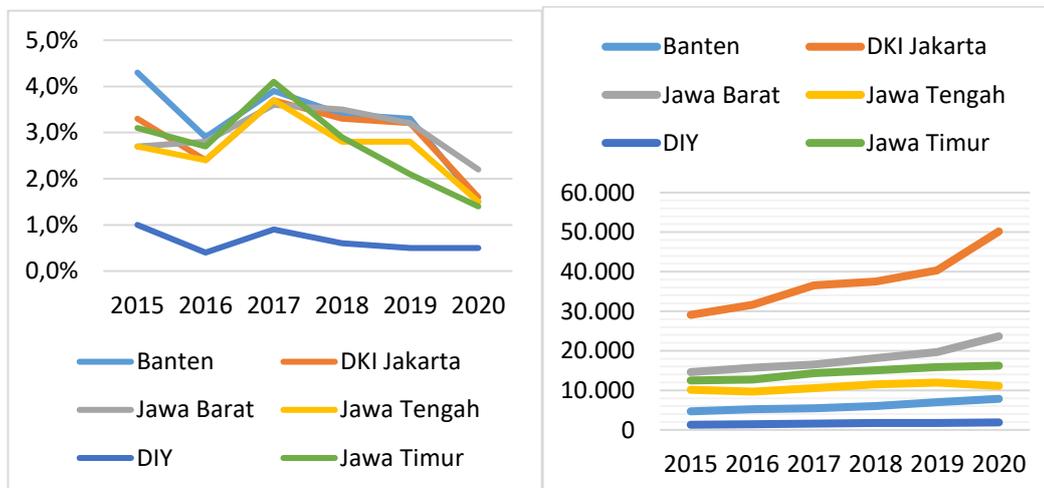
Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata yang diterima tiap penduduk dalam kurun waktu 1 tahun pada suatu daerah. Pendapatan per kapita ini diperoleh dari pembagian antara total PDRB dan jumlah penduduk di suatu kota/provinsi. Data yang pendapatan per kapita ini ialah indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kemakmuran wilayah. Berdasarkan grafik, pendapatan per kapita enam provinsi di pulau Jawa memperoleh peningkatan selama lima tahun berturut-turut, tetapi semua serentak mengalami penurunan pada 2020. Hal ini karena munculnya pandemi covid-19.

DKI Jakarta memiliki pendapatan perkapita tertinggi dibanding provinsi lain di pulau Jawa. Hal ini, sebab Jakarta juga menjadi pusat bisnis, industri jasa dan

sektor keuangan terbesar di Indonesia. DKI Jakarta mampu mencatatkan pendapatan per kapita terbesar, dengan menyentuh angka dikisaran 230 juta, namun pada 2020 pendapatan per kapitanya menurun disebabkan oleh tidak optimalnya produksi, sedangkan penerimaan pajaknya meningkat. Hal sama terjadi di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dimana memiliki pendapatan per kapita termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai sebesar 38-53 juta yang dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi dan adanya peningkatan daya beli masyarakat sebagai efek dari peningkatan upah. Pada Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta memiliki pendapatan per kapita yang termasuk rendah, disebabkan oleh adanya penurunan dari sektor industri pengolahan dan perdagangan, serta adanya perubahan konsumsi makanan dan non makanan akibat dari inflasi. Pada provinsi Banten memiliki pendapatan perkapita tinggi yang berada dikisaran 45 juta yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk lebih rendah dibandingkan tingginya produksi pada industri olahan serta perdagangan besar dan eceran, namun penerimaan pajak yang dihasilkan daerah tersebut termasuk rendah. Hal sama terjadi di provinsi Jawa Barat, dimana pendapatan per kapita termasuk pada kategori rendah sebesar 30 juta, namun penerimaan pajaknya tinggi. Nyatanya hal ini berlawanan dengan teori pajak Musgrave yang mana besaran pendapatan perkapita dapat mempengaruhi besaran penerimaan pajak yang diterima oleh daerah (Supriyanto, 2018).

Menurut data BPS, tahun 2016 seluruh provinsi di Pulau Jawa memberikan peran terbesar melalui pendapatan perkapita dibandingkan dengan provinsi di pulau lainnya. Faktanya bersumber pada dokumen World Bank tahun 2016 menyebutkan Indonesia justru masuk dalam kategori negara dengan pendapatan *lower-middle*, terlepas dari peningkatan dari tahun ke tahun bagi pendapatan per kapita yang memiliki peran besar. Rendahnya pendapatan perkapita ini sebagai dampak dari sebaran penduduk yang timpang pada suatu wilayah tertentu. Rendahnya pendapatan per kapita ini dapat memberikan dampak atas jalannya pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Grafik 5. Inflasi (persen) dan Penerimaan Pajak (milyar) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Suatu negara atau daerah tidak terlepas dari keadaan inflasi. Apabila inflasi terjadi secara umum penjualan produk maupun jasa dapat menjadi semakin kecil. Apabila penjualan produk dan jasa menurun akan memberikan dampak negatif yang sangat besar (Sitinjak, 2016). Dimulai dari menurunnya profit perusahaan, penutupan perusahaan, meningkatnya pengangguran sampai terganggunya penerimaan pajak. Berdasarkan grafik di atas, rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada provinsi Banten dan Jawa barat dengan kisaran sebesar 3.2% yang mana lebih besar daripada rata-rata nasional sebesar 3.0%. Inflasi yang tinggi tersebut disebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok khususnya beras. Selanjutnya untuk provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai tingkat inflasi rendah dibawah nasional dengan kisaran 2.6% yang dipengaruhi oleh adanya penurunan harga pada telur ayam, cabe rawit dan angkutan antarkota.

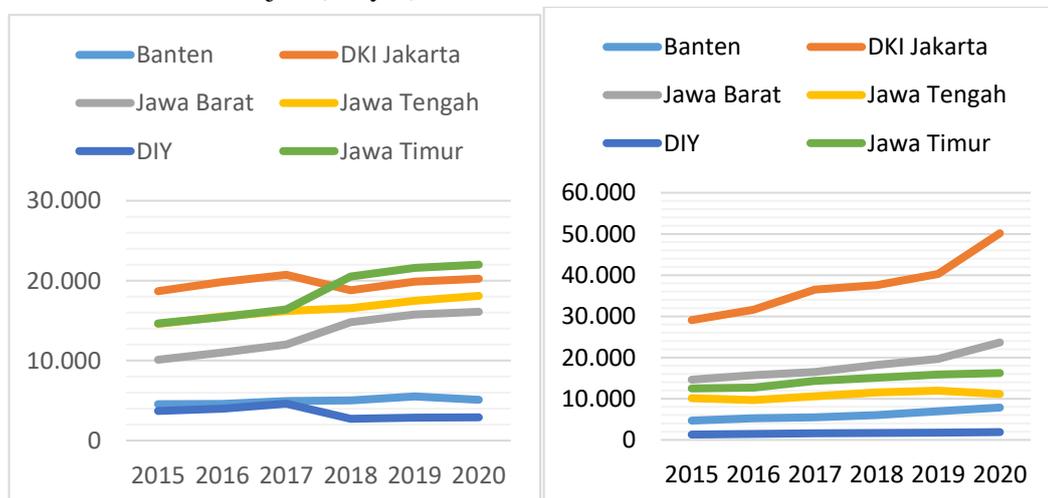
Pada daerah D.I Yogyakarta memiliki rata-rata inflasi rendah sebesar 0.7%, namun penerimaan pajak juga rendah. Rendahnya inflasi dipengaruhi adanya permintaan domestik yang belum mencukupi sebagai dampak dari pandemi dan kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah setempat dalam mempertahankan harga yang stabil (Bank Indonesia, 2020). Hal yang sama juga terjadi pada provinsi DKI Jakarta, dimana rata-rata tingkat inflasi tinggi sebesar 2.9% tingginya inflasi tersebut disebabkan peningkatan harga sejumlah bahan pangan, di tengah terbatasnya persediaan pangan yang didorong dengan tidak optimalnya produksi pada masa pandemi dan meningkatnya curah hujan sehingga

mempengaruhi produksi dan distribusi pada bahan pangan, namun penerimaan pajaknya tinggi (Kementerian Perdagangan, 2021). Hal ini bertolak belakang dengan teori inflasi keynes, dimana tingginya inflasi menyebabkan rendahnya penerimaan pajak, namun nyatanya pada provinsi tersebut tingginya inflasi diikuti oleh penerimaan pajak yang tinggi begitupun sebaliknya.

Hal ini berarti, inflasi mempengaruhi penerimaan pajak secara negatif. Besarnya inflasi ini dapat menurunkan kemampuan masyarakat untuk membeli. Kemampuan beli yang turun dapat berakibat pada jumlah produksi perusahaan maka penghasilan kena pajak pada perusahaan juga dapat menurun. Penerimaan pajak dapat menurun apabila inflasi daerah tinggi, begitupun sebaliknya (Damayanti, Suhandak, & M.G.W.E.N, 2016). Inflasi yang dijaga agar stabil dapat memberikan dampak baik bagi kegiatan ekonomi. Inflasi yang cenderung rendah dan stabil dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu oleh Damayanti dkk (2016) menunjukkan hasil inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak. Sedangkan, pada penelitian Hartono (2019) menyatakan hasil inflasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penerimaan pajak.

Grafik 6. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor (juta unit) dan Penerimaan Pajak (milyar) di Pulau Jawa Tahun 2015-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik 2021.

Jumlah kendaraan bermotor merupakan jumlah kendaraan beroda dua atau lebih yang dimiliki oleh seseorang di suatu wilayah. Kategori kendaraan bermotor pada grafik di atas yaitu sepeda motor dan mobil pribadi yang penggunaannya mempunyai pengaruh dalam aktivitas masyarakat. Jumlah penduduk yang tinggi

diikuti dengan mobilitas yang tinggi mendorong peningkatan kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi oleh angkutan publik yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menjadi pilihan karena dinilai lebih praktis. Berdasarkan grafik di atas, rata-rata peningkatan jumlah kendaraan bermotor kategori sepeda motor dan mobil terendah selama enam tahun terakhir yaitu Provinsi D.I Yogyakarta lalu diikuti oleh Provinsi Banten yaitu hanya sebesar 3-4 juta unit. Rendahnya peningkatan tersebut disebabkan implementasi kebijakan kredit kendaraan bermotor yang dilakukan Bank Indonesia dengan menaikkan jumlah uang muka, dapat pula dikarenakan terjadinya mutasi kendaraan atau peralihan kepemilikan kendaraan. Hal yang sama terjadi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki rata-rata peningkatan tertinggi menyentuh angka 16-18 juta unit. Mengingat bertambahnya volume mobilitas penduduk akibat meningkatnya jumlah penduduk mempengaruhi peningkatan pada jumlah kendaraan. Hal ini juga disebabkan keadaan transportasi umum yang belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, selain itu mudahnya pembelian kendaraan secara kredit juga mempengaruhi peningkatan kendaraan bermotor kategori sepeda motor dan mobil, namun penerimaan pajak tertinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hal ini bertolak belakang dengan teori, dimana tingginya jumlah kendaraan diikuti oleh jumlah penerimaan pajak.

Dalam penelitian terdahulu oleh Tiawan dkk (2020) menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor terhadap variabel penerimaan pajak. Sedangkan, pada penelitian Fauziah (2018) menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang melihat pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak, yaitu dengan fokus menghubungkan variabel-variabel tersebut dengan meningkatnya penerimaan pajak. Adapun penelitian tersebut antara lain yang dilakukan oleh Hartono (2019), Sitingjak (2016), Tiawan dkk (2020), Damayanti dkk (2016) dan Fauziah (2018). Dalam penelitiannya menyatakan adanya pengaruh dari variabel bebas yang digunakan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dalam mengembangkan dan meneliti faktor-faktor

yang mempengaruhi penerimaan pajak di pulau Jawa seperti jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah kendaraan bermotor, sehingga didapat judul penelitian yang dapat diangkat adalah “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pulau Jawa”.

I.2 Perumusan Masalah

Penerimaan pajak sebagai sumber utama yang diandalkan pemerintah karena perolehannya telah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Pulau Jawa sebagai salah satu pulau yang ikut berperan besar dalam penerimaan pajak negara, terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak pada daerahnya. Penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk yang mempengaruhi tingkat permintaan baik investasi maupun penyeter pajak pada suatu daerah. Meningkatnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan semakin tinggi ekonomi daerah dan untuk mencukupi keperluan barang dan jasa maka secara langsung dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Apabila tingkat inflasi yang terjadi tinggi dapat membuat melemahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dalam membeli kebutuhan tersier juga berakibat atas penerimaan pajak yang dihasilkan setiap tahun melalui jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak pulau Jawa?
- b. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak pulau Jawa?
- c. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pulau Jawa?
- d. Bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pulau Jawa?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah, untuk itu didapat tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.

- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pulau Jawa.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan membuka wawasan serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di pulau Jawa khususnya, juga dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di pulau Jawa.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi pemerintah, untuk bahan masukan dalam membuat kebijakan mengenai pajak dan upaya meningkatkan penerimaan pajak.
 - 2) Bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya, sebagai informasi dan pengetahuan mengenai besarnya penerimaan pajak dan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pembangunan dan pertumbuhan melalui pajak, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi tambahan untuk melakukan penelitian yang sama.